



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ERVIN SUGIAR
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 419147

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.400.000.000

1. Tanah Seluas 39.999 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 39.630 m2 di KAB / KOTA LABUHANBATU UTARA, Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T / SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ/ MOBIL PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 103.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.352.336

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.639.652.336

III. HUTANG Rp. 1.892.779.626

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 746.872.710

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.